

KAWASAN CAGAR BUDAYA NASIONAL TROWULAN DARI MASA KLASIK HINGGA PASCA REFORMASI

Lauhil Fatihah¹, Edi Dwi Riyanto²

¹Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga

²Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga
fatihahlauhil@gmail.com, edi-d-r@fib.unair.ac.id

Abstrak

Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan merupakan kawasan konservasi Cagar Budaya yang berada di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang yang saat ini menjadi kawasan konservasi Cagar Budaya yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Selama ini masyarakat luas mengenal kawasan tersebut sebagai kawasan bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit, padahal tinggalan arkeologi yang terdapat di kawasan tersebut menunjukkan bahwa peradaban yang pernah menghuni kawasan tersebut tidak hanya merupakan tinggalan dari masa Majapahit, namun juga terdapat peradaban lain yang lebih tua usianya. Perkembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan pasca Majapahit juga memiliki dinamika yang cukup dramatis, namun kawasan tersebut tetap mempertahankan identitasnya sebagai kawasan yang menyimpan sisi historis yang sangat menarik untuk dikaji. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perkembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan dari aspek historis mulai masa klasik hingga pasca reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang melalui empat tahap penelitian, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan telah dihuni oleh berbagai peradaban manusia sejak abad ke-10 masehi sampai pasca reformasi yang memiliki andil dalam membentuk kebudayaan yang ada di kawasan tersebut.

Kata kunci: Kawasan Cagar Budaya Nasional, Trowulan, Majapahit

Abstract

Trowulan National Cultural Heritage Area is a Cultural Heritage conservation area located in two districts, namely Mojokerto Regency and Jombang Regency, which is currently a Cultural Heritage conservation area protected by the Government of Indonesia. So far, the wider community knows the area as the former capital of the Majapahit Kingdom, even though the archaeological remains in the area show that the civilization that once inhabited the area is not only a relic of the Majapahit period, but there are also other civilizations that are older. The development of the Trowulan National Cultural Heritage Area after Majapahit also has quite dramatic dynamics, but the area still maintains its identity as an area that holds a very interesting historical side to study. This research will discuss how the development of the Trowulan National Cultural Heritage Area from the historical aspect from the classical period to the post-reform era. This research is a qualitative study using historical research methods through four stages of research, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this study show that the Trowulan National Cultural Heritage Area has been inhabited by various human civilizations since the 10th century AD until the post-reformation which has contributed to shaping the culture in the area.

Keywords: National Cultural Heritage Area, Trowulan, Majapahit.

PENDAHULUAN

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (Taki & Wartaman, 2023:166). Kawasan konservasi adalah suatu kawasan atau wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang harus dilindungi dengan tujuan agar kondisi pada kawasan tersebut tetap Lestari. Kawasan dapat dijadikan sebagai wilayah konservasi karena wilayah tersebut memiliki keunikan dan kekhasan tertentu serta memiliki peranan yang sangat penting bagi lingkungan di sekitarnya (Damanik, 2020:3). Kawasan konservasi dapat berupa konservasi Cagar Budaya, Cagar Alam, Kebun Raya, Taman Laut, Hutan Lindung, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, yaitu berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar Budaya, kemudian dibagi menjadi lima jenis Cagar Budaya, yaitu Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Cagar Budaya memiliki peringkat, yaitu Cagar Budaya tingkat nasional, Cagar Budaya tingkat provinsi, dan Cagar Budaya tingkat kota/kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 140/M/2023 tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Trowulan dengan menimbang bahwa satuan ruang geografis Trowulan telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2013 tentang penetapan satuan ruang geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional yang mengandung Cagar Budaya yang sangat rentan dari potensi ancaman faktor alam dan manusia, sehingga perlu ditetapkan sistem zonasi untuk melindungi Cagar Budaya. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tindak

lanjut dalam upaya pelestarian Cagar Budaya yang terdapat di Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan sebagai bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit di masa lampau.

Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan berada pada ujung kipas alluvial Jatirejo akibat proses geologi dari Sungai Jurang Celot di kaki Gunung Anjasmoro, di daerah kipas aluvial ini Sungai Jurang Celot kemudian menjadi Sungai Boro, bergabung dengan Sungai Landean dan Sungai Pikatan, serta membentuk Sungai Brangkal. Pada palung Sungai Brangkal banyak menampung endapan lahar dingin karena berhulu pada daerah kipas aluvial. Hal tersebut menyebabkan aliran sungai berpindah-pindah dan mendangkalkan palung sungai, sehingga air dapat meluap dan membanjiri daerah sekitarnya, sedangkan Sungai Gunting yang berada di sebelah barat Trowulan berada di luar Kipas Alluvial Jatirejo, sehingga alirannya tidak membawa banyak endapan, sehingga tidak menimbulkan banjir bagi wilayah Trowulan (Puslitarken, 1988:3).

Keberadaan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan yang strategis menjadikan kawasan tersebut menjadi wilayah yang sangat subur dan kaya akan air, sehingga selalu dihuni oleh manusia dari berbagai lintas zaman. Peradaban manusia yang dapat dilacak adalah sejak abad ke-10 pada masa pemerintahan Pu Shindok dari Kerajaan Medang Kamulan yang kemudian berlanjut sampai pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Islam mulai ditinggalkan oleh manusia dan kemudian dihuni kembali oleh manusia pada masa colonial sampai sekarang. Saat ini kawasan tersebut telah berubah fungsi menjadi lahan pemukiman penduduk yang dihuni oleh masyarakat modern. Selama ini Masyarakat luas mengenal Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan sebagai bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit, padahal kawasan tersebut telah dihuni oleh manusia sejak abad ke-10 Masehi.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait dengan sejarah Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan, yaitu penelitian oleh Kartodirjo (1993) dengan judul *700 Tahun Majapahit, 1293-1993 : Suatu Bunga Rampai* membahas mengenai tinggalkan arkeologi, sistem ekonomi, politik, agama, sosial, dan budaya masyarakat pada Masa Majapahit. Penelitian oleh Perkasa (2015) yang berjudul *Dalam Bayangan Kebesaran Masa Lalu : Transformasi Pemakaian dan Pemanfaatan Warisan Majapahit dari Pra-Kolonial Hingga Pascakolonial di Indonesia* dalam penelitian ini dibahas mengenai transformasi wacana dan kepentingan manusia yang terlibat dalam pemanfaatan warisan Kerajaan Majapahit di Trowulan, dalam penelitian ini juga dibahas mengenai sejarah awal

berdiri Kerajaan Majapahit hingga era modern. Kubontubuh (2021) dalam penelitian yang berjudul *Model Konseptual Pelestarian Berbasis Kawasan Bagi Cagar Budaya Tak Uneh Studi Kasus Kawasan Ibu Kota Majapahit di Trowulan Jawa Timur* dalam penelitian ini disinggung mengenai sejarah Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan pada masa Kerajaan Majapahit hingga era modern.

Penelitian oleh Munandari (2024) dengan judul *Majapahit : Narasi yang Tiada Pernah Usai* mengulas mengenai berbagai aspek dari kehidupan pada masa Majapahit pada abad ke 14-15 Masehi yang ditinjau dari tinggalan arkeologis, sejarah, dan kajian budaya. Beberapa penelitian telah menemukan data sejarah mengenai Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan sebagai bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit di masa lampau. Beberapa penelitian tersebut mayoritas hanya terbatas pada masa Kerajaan Majapahit sampai era modern, namun belum ada penelitian yang membahas mengenai Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan mulai dari masa klasik yang lebih jauh dari masa Majapahit, mengingat kawasan tersebut tidak hanya pernah dihuni oleh peradaban masa Majapahit saja, sehingga peneliti berharap dapat menutup *gap* dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan mulai dari abad ke 10 Masehi sampai masa pasca reformasi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengungkap keberadaan dan peran peradaban lain, selain Majapahit yang ikut andil dalam pembentukan kebudayaan yang ada di kawasan tersebut. Selama ini masyarakat hanya mengetahui narasi mengenai Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan sebagai bekas Kerajaan Majapahit, padahal apabila ditilik melalui analisis historis kawasan tersebut bukan hanya menyimpan sejarah dari peradaban masa Majapahit, namun jauh lebih tua, yaitu sejak abad ke-10 Masehi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana perkembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan melalui sisi historis dengan menggunakan menggunakan metode penelitian sejarah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan sumber penelitian, baik sumber primer, maupun sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini didapatkan melalui dokumen resmi terkait dengan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan, baik berupa

prasasti, maupun dokumen administrasi. Tahap kritik sumber dilakukan dengan dua cara, yaitu kritik intern dan ekstern, kritik intern dilakukan guna menilai kredibilitas sumber dan kritik ekstern dilakukan guna mengetahui keaslian dan otentisitas sumber sejarah. Tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan data, yaitu dengan menganalisis dan menguraikan fakta yang didapat. Tahap historiografi dilakukan dengan menyusun dan menulis hasil penelitian secara sistematis tentang fakta yang diperoleh selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Pada Masa Klasik

Pada tahun 852 Saka atau 930 Masehi Pu Sindok mengeluarkan titah berupa Prasasti Masahar. Pu Sindok yang merupakan raja Kerajaan Medang yang memindahkan Ibu Kota Kerajaan Medang dari Tengah ke Jawa Timur, akibat adanya pralaya. Dalam prasasti tersebut Pu Sindok menetapkan penetapan sima di wilayah Masahar. Prasasti Masahar ditemukan saat dilakukan ekskavasi penyelamatan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI pada tahun 2022 di Dusun Kedawung, Desa Gemekan, Kecamatan Sooko. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut dibeli untuk dijadikan sima untuk bangunan suci Parumbigyan. Tanah sima sendiri merupakan tanah yang bebas pajak dan akan tetap berlaku sampai kapanpun, meskipun berganti pemerintah raja siapapun. Dalam prasasti tersebut juga disebutkan nama-nama tamu kehormatan beserta asal wilayahnya.

Pada tahun 861 Saka atau 939 Masehi Pu Sindok mengeluarkan titah dalam prasasti Alasantan sebagai piagam peresmian daerah Alasantan menjadi sima dengan status swatantra (Wigowo, 1979:3). Prasasti tersebut memuat keterangan bahwa pada hari Jumat Pahing tanggal 5 Krēṣṇapakṣa bulan Bhadrwāda tahun 861 Śaka (6 September 939), perintah dari Śrī Mahārāja Rakai Halu Dyah Sindok Śrī Isanawikrama diterima oleh Rakryan Mapatih i Halu Dyah Sahasra dan diteruskan pada Samgat Kanuruhan Pu Uda, yang memerintahkan agar supaya tanah di Alasantan yang termasuk wilayah kekuasaan Bawang Mapapan, dijadikan śīma bagi Rakryan Kabayan, yaitu ibu dari Rakryan Mapatih i Halu Dyah Sahasra (Wigowo, 1979:11).

Rakryan Bawang diduga merupakan ayah mertua dari Pu Sindok atau ayah dari istri Pu Sindok, yaitu Dyah Kebi. Daerah Alasantan merupakan wilayah kekuasaan Rakryan Bawang yang kemudian diserahkan kepada Rakryan Kabayan. Prasasti Alasantan ditemukan sekitar kurang lebih 45 meter pada sebelah barat daya Candi Brahu, ketika

penduduk lokal sedang menggali parit untuk tanaman tembakau. Daerah Alasantan saat ini diduga merupakan wilayah Dusun Bejjong, Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan. Dusun Bejjong sendiri berada bersebelahan dengan Dusun Kedungwulan, Desa Bejjong yang dahulunya diduga bernama Lmah Tulis. Penyebutan nama Lmah Tulis dalam prasasti diduga mengindikasikan bahwa lokais tersebut berdekata, sehingga Alasantan juga diduga berada di sekitar Dusun Kedungwulan (Wigowo, 1979).

Kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan yang didirikan oleh Raja Airlangga pada tahun 1019. Pada era Kerajaan Kahuripan dikenal sosok bernama Mpu Bharada yang merupakan tokoh yang membelah tanah Jawa menjadi dua, akibat adanya pertarungan dua putra mahkota yang memperebutkan tahta. Menurut Serta Calon Arang Bharada merupakan pendeta yang membangun pertapaan Lmah Tulis pada era pemerintahan Raja Airlangga. Mpu Bharada merupakan pendeta yang selalu diajak bermusyawarah oleh Raja Airlangga. Dalam Negarakretagama, desa perdikan Lmah Tulis juga masih ada sampai masa pemerintahan Hayam Wuruk. Lmah Tulis disebut juga sebagai Sima Swatantra Lmah Tulis yang diduga berada di dekat Trowulan, Mojokerto (Mulyana, 1979).

Pada tahun 1211 Saka atau 1298 Masehi, Raja Kertanegara mengeluarkan prasasti, yaitu Prasasti Wurare yang ditemukan di Dusun Kedungwulan, Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan. Prasasti Wurare merupakan prasasti yang berisi mengenai peringatan penobatan arca Mahaksobhya di sebuah tempat bernama Wurare, sehingga disebut Prasasti Wurare. Prasasti ditulis dalam bahasa Sansekerta dan bertarikh 1211 Saka atau 21 November 1289. Arca tersebut merupakan bentuk penghormatan dan perlambang bagi Raja Kertanegara dari kerajaan Singhasari yang dianggap oleh keturunannya telah mencapai derajat Jina (Buddha Agung), sedangkan tulisan prasastinya ditulis melingkar pada bagian bawahnya (Sukatno & Mulyono, 2018:360). Dalam prasasti tersebut berisikan mengenai pujian sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Kertanegara yang telah berhasil menyatukan Daha dan Panjalu.

Menurut Poesponegoro & Notosusanto (1984) menjelaskan bahwa Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293 dengan menikah keempat putri dari Raja Terakhir Singhasari, yaitu Kertanegara. Raden Wijaya memimpin pada tahun 1293-1309. Raja kedua Kerajaan Majapahit adalah Jayanegara yang memimpin pada tahun 1309-1328. Pada tahun 1328, sepeninggal Jayanegara, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh putri Raden Wijaya, yaitu Tribuwanatunggadewi pada tahun 1328-1350. Pada kepemimpinan Tribuwanatunggadewi dibantu oleh Patih Gajah Mada yang menghantarkan Majapahit pada masa keemasannya sampai era Hayam Wuruk. Hayam Wuruk memimpin pada tahun

1350-1389. Sepeninggal Hayam Wuruk, oleh karena Hayam Wuruk tidak memiliki putra, maka Kerajaan Majapahit dipimpin oleh menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk, yaitu Wikramawardhana yang memerintah pada tahun 1389-1400.

Pada tahun 1400, Suhita naik tahta menggantikan posisi putra mahkota yang telah meninggal, yaitu Bhre Tumapel (Bhra Hyang Wekasing Sukha) yang meninggal sebelum naik tahta pada tahun 1399. Duduknya Suhita di atas takhta menimbulkan akar kericuhan di Majapahit, yaitu pertentangan keluarga, yaitu keluarga Wikramawardhana dan Bhre Wirabumi. Bhre Wirabumi merupakan putra Hayam Wuruk yang lahir dari istri selir. Pada tahun 1401 mulailah timbul persengketaan dan tiga tahun kemudian memuncak yang menimbulkan huru-hara, yaitu Perang Paregreg. Perang tersebut terjadi antara pihak Bhre Wirabumi dari kedaton timur dan pihak Wikramawardhana dari kedaton barat. Pada tahun 1406 Bhre Wirabumi terbunuh.

Masa pemerintahan Suhita berakhir pada tahun 1447, oleh karena Suhita tidak memiliki keturunan, maka tahta diwariskan kepada adiknya, yaitu Bhre Tumapel Dyah Kertawijaya. Pada tahun 1451 Dyah Kertawijaya digantikan oleh Bhre Pamotan sampai tahun 1453, kemudian pada tahun 1453-1456 terjadi kekosongan tanpa raja (*interregnum*) yang diduga terjadi akibat adanya pertentangan dan peperangan antara keluarga berlarut-larut. Pada tahun 1456, Dyah Suryawikrama Girisawardhana, salah seorang anak dari Dyah Kertawijaya (Bhre Wengker) menaiki tahta Majapahit sampai tahun 1466. Pada tahun 1466, Bhre Pandan Salas naik tahta dan memerintah Kerajaan Majapahit, namun akibat serangan dari Bhre Kertabumi, Bhre Pandansalas memindahkan keraton Majapahit ke Daha dan memerintah sampai pada tahun 1468 (Poesponegoro & Notosusanto, 1984).

B. Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Pada Masa Islam

Pada tahun 1468 sampai tahun 1474 Majapahit dipimpin oleh Singawardhana, kemudian pada tahun 1474-1478 Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Bhre Kertabhumi yang merupakan paman dari Singawardhana. Pada tahun 1478 tentara Demak melakukan invasi ke Kerajaan Majapahit dengan menyerang kerajaan tersebut, kemudian pada tahun tersebut pula Majapahit telah resmi menjadi negara bawahan dari Kerajaan Demak. Invasi tersebut dipimpin Panembahan Jimbun atau Raden Patah yang merupakan putra dari raja Wikramawardhana yang lahir dari putri Cina. Pada tahun tersebut Panembahan Jimbun atau Raden Patah mengangkat Njoo Lay Wa sebagai penguasa dari Kerajaan bawahan tersebut, namun akibat banyaknya pemberotakan dari rakyat yang tidak suka dipimpin oleh etnis lain, sehingga menyebabkan Njoo Lay Wa terbunuh pada tahun 1486. Melihat kondisi

tersebut, maka Raden Patah mengangkat Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang merupakan putra dari Singawardhana dan menantu dari Raja Kertabhumi sebagai Raja Majapahit pada tahun 1486.

Girindrawardhana memerintah sampai tahun 1527, selama empat puluh tahun, kemudian oleh karena Girindrawardhana mengadakan hubungan dengan orang-orang Portugis di Malaka yang merupakan musuh sultan Demak dalam persaingan dagang dan perebutan kekuasaan, maka Majapahit untuk kedua kalinya diserbu oleh tentara Demak di bawah pimpinan Toh A Bo, putra sultan Trenggana alias Tung Ka Lo dan pada tahun tersebut, Girindrawardhana wafat. Putra dan putri Girindrawardhana segan tunduk kepada kesultanan Demak dan segan memeluk agama Islam, sehingga mereka melarikan diri ke Panarukan, oleh karena Panarukan secara resmi tidak pernah dikuasai Demak. Pusat kerajaan Majapahit dijarah-rayah oleh tentara Demak dan berakhirlah Majapahit, baik sebagai kerajaan yang pernah mengalami keagungan maupun sebagai negara bawahan Demak. Penyerbuan Majapahit oleh tentara Demak terjadi pada tahun 1527, setahun setelah tentara Demak berhasil menundukkan raja Baduga di Pajajaran dan menghalau orang-orang Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa (Muljana, 2005:30).

Banyaknya hiruk-pikuk peperangan di kawasan keraton Majapahit yang disebabkan oleh peperangan saudara anatar kedaton timur dan kedaton barat, kemudian peperangan akibat invasi dari Kerajaan Islam menyebabkan Ibu Kota Majapahit di Trowulan dalam kondisi porak poranda. Perpindahan Ibu Kota Majapahit di wilayah Keling di daerah Kediri sekarang, menyebabkan kota raja tersebut ditinggalkan penghuninya. Eksistensi Kerajaan Demak sebagai Kerajaan baru yang berkuasa di Jawa membuat masyarakat berbondong-bondong pindah ke pusat kota baru dan mencari kehidupan di sana. Kondisi politik yang telah menyebabkan Majapahit menjadi Kerajaan bawahan Demak, menyebabkan turunnya pamor Majapahit, sehingga kota raja tersebut perlahan-lahan berubah menjadi kota mati. Kehancuran ibu kota Majapahit ternyata tidak serta merta, disebabkan oleh berubahnya kota tersebut menjadi kota mati, namun terdapat juga faktor lain berupa bencana alam.

Menurut sejarah geologinya, dataran rendah lembah Sungai Brantas dari Blitar sampai Mojokerto dulunya merupakan suatu teluk lautan yang semakin lama terisi oleh endapan gunung berapi dari Gunung Kelud (Daldjoeni, 1984), sehingga endapan Sungai Brantas berasal dari Gunung Kelud maka endapan di sepanjang alirannya ini subur dan cocok untuk perniagaan, selain itu keberadaan Sungai Brantas menguntungkan karena sebagai akses penghubung yang lebih cepat dan aman antar daerah pedalaman dengan

pesisir. Mengingat Ibu kota kerajaan Majapahit yang berada di pedalaman, maka kerajaan Majapahit sukses memadukan keunggulan agraris dan memperluas kekuatan maritimnya dengan memanfaatkan Sungai Brantas sebagai penghubung ke laut lepas.

Wilayah Majapahit termasuk kawasan rawan bencana geologi, baik berupa letusan gunungapi, gempa, banjir dan semburan lumpur. Pada masa Singasari dan Majapahit, bencana-bencana pernah terjadi melanda dua kerajaan tersebut, seperti tercatat di Kitab Pararaton. Penggalian arkeologi masih berlangsung dan telah menemukan beberapa lapisan bangunan Majapahit dan yang lebih tua yang terkubur lumpur lempung atau sebagian material vulkanik hal ini tertulis dalam Pararaton yang memuat berita kejadian bencana geologi seperti *banyu pindah*, *gunung anyar*, *gunung jeblog*, *lindu* di kawasan Kerajaan Singasari dan Majapahit di sekitar Kediri sampai Delta Brantas sekarang. Delta Sungai Brantas terbentuk selama berabad abad dan tersusun oleh endapan delta, endapan sungai dan endapan rawa air payau. Tanah endapan delta Brantas umumnya jelek dan tidak subur yang tumbuh hanya semak belukar, endapan delta terus maju ke arah laut dan semakin luas (Widodo & Syaifuddin, 2021:208-209).

Sampurno, dkk (1980) menyatakan bahwa Kerajaan Majapahit pernah terlanda aliran pasir dan kerikil, selama Kerajaan Majapahit berdiri telah terjadi 8 kali letusan Gunung Kelud dan letusan tersebut akan berpengaruh terhadap pendangkalan Sungai Brantas. Menurut Bandonno (1980), pasca Majapahit runtuh terjadi penutupan lebih lanjut, oleh letusan Gunung Kelud sebanyak 15 kali. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan pasir tufa oleh letusan gunung api, baik diendapkan lewat udara, maupun oleh air. Letusan gunung lainnya, baik Gunung Welirang, Arjuno dan Punggungan tidak pernah tercatat dalam sejarah, kecuali retakan yang terjadi di Gunung Welirang pada tahun 1950 (Sampurno & Bandonno, 1980).

Majapahit telah benar-benar ditinggalkan oleh penghuninya dan telah menunjukkan gejala-gejala kehancuran selain kerusakan yang disebabkan oleh manusia, baik akibat perang dan penjarahan. Kerusakan lainnya juga disebabkan oleh bencana alam yang kemudian menjaid faktor kota tersebut semakin lenyap bak ditelan bumi. Musim demi musim, baik panas dan hujan, serta banyaknya bangunan yang tidak berpenghuni yang tidak terawat kian banyak yang ambruk, dan benar-benar mendukung alam untuk mengubur kota tersebut. Alam telah menang kota semegah itu pada akhirnya reyot termakan alam dan hanya menyisakan beberapa petunjuk bahwa peradaban tersebut pernah ada di masa lalu. Pada akhirnya kota megah yang menyimpan banyak kisah kejayaan dan hal kelam telah benar-benar berubah menjadi kota mati.

C. Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Pada Masa Kolonial

Menurut Kubontubuh (2021), pada abad ke-17 dalam *Kidung Pamancangah* disebutkan bahwa terdapat beberapa peristiwa penting mengenai kunjungan raja-raja Bali ke Trowulan, meskipun pada waktu itu Trowulan telah menjadi kota mati. Pada abad tersebut, secara administratif Trowulan merupakan bagian dari wilayah yang bernama Japan sebagai daerah bawahan dari Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh Untung Suropati (1645-1706). Catatan mengenai daerah Japan pernah dikemukakan dalam laporan Belanda, yaitu dalam catatan harian dari Kastil Batavia (*Daghregisters van het Kasteel Batavia*) tertanggal 21 Juli 1708 bahwa Amangkurat III yang bertakhta 1703-1708 di Kerajaan Mataram Islam ditangkap pada 23 Juni 1708 di Japan (Ricklefs 1993:148-9; Niemeijer, 2019: 258-9), namun terdapat kesalahan pencatatan yang merujuk kepada Juli 1708 padahal seharusnya pada Juni 1708. Berdasarkan Perjanjian Giyanti (1755) mencantumkan bahwa Distrik Japan dan Distrik Wirosobo menjadi bagian dari monconegoro timur Yogya yang dikelola bupati wedana (bupati senior) di Madiun, pasca tahun 1760, Raden Ronggo Prawirodirjo I yang menjabat pada tahun 1760-1784, sehingga Trowulan sebagai bagian dari Japan dan selanjutnya tidak lagi berada di bawah Pasuruan.

Pada tahun 1809-1810 Daendels melaksanakan Pembangunan Jalan Raya Pos (*greoote poestweg*) yang membujur 1.100 km dari Anyer hingga Panarukan dan pembangunan jalan tersebut turut berpengaruh pada KCBN Trowulan karena menjadi cabang dari Jalan Raya Pos tersebut. Daendels juga menyebutkan nama Japan sebagai penghasil kayu jati untuk kepentingan konstruksi benteng Daendels di Fort Lodewijk di Selat Madura dalam suratnya kepada Nicolaas Engelhard (1761-1831), yaitu Gubernur Pantai Timur Laut Jawa yang menjabat pada tahun 1801-1808 (Carey, 2021:248 dalam Kubontubuh: 2021).

Pada tanggal 22 Agustus 1815, Wardenaar sebagai surveyor militer diperintahkan Raffles untuk membuat peta Trowulan. Kawasan tersebut dilewati oleh cabang dari Jalan Raya Pos (*grote postweg*) Anyer-Panarukan yang telah dibangun Daendels pada tahun 1809-1810. Kawasan Trowulan terbelah oleh jalan yang menuju Wirosobo (saat ini Mojoagung) dan jalan menuju Japan (saat ini Mojokerto). Pembangunan tersebut menyebabkan dampak kehancuran yang luar biasa terhadap fisik dan artefak peninggalan Majapahit. Hasil dari peta tersebut menunjukkan bahwa terdapat sekitar 26 unit rumah di kawasan Desa Kedaton dengan populasi 50-130 jiwa (Kubontubuh: 2021).

Pada tahun 1815 Wardenaar memperoleh tugas dari Raffles untuk melakukan penelitian tinggalan arkeologi di Trowulan dan hasil survei tersebut masuk dalam buku *History of Java*. Pada tahun-tahun selanjutnya terdapat peneliti lain yang meneliti peninggalan arkeologi di Trowulan, yaitu W.R. van Hovell (1849), J.F.G. Brumund (1854), dan Jonatan Rigg (1849) yang semuanya diterbitkan secara berturut-turut dalam *Journal of The Indian Archipelago and Eastern Asia* sejak 1849. J. Hageman (185) juga melakukan penelitian dengan judul *Toelichting over den Ouden Pilaar van Modjopahit* dan terdapat pula buku album berjudul *Javaansche Oudheden 1852-1856* dengan salah satu gambarnya berjudul *Ruine van Madjopaid* (Wibowo, 1982:3).

Pada masa sistem tanam paksa (1830-1870), area utama Trowulan tidak mengalami perubahan fungsi lahan antara tahun 1830 dan 1879, walau area di luar Trowulan ditanami tebu sebagaimana desa-desa lainnya dalam periode Tanam Paksa. Berdasarkan peta dari Survei Artileri atau *Ordnance Survei (OS)* menunjukkan bahwa pada tahun 1879 hanya tersisa 6 rumah dari 26 rumah yang digambarkan oleh Wardenaar pada tahun 1815. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk Trowulan justru berpindah keluar dari Trowulan pada periode Tanam Paksa tersebut, setelah tahun 1879 barulah terjadi perubahan besar di mana peta *Ordnance Survei (OS)* dan survei topografi sejak tahun 1892, 1915, 1925, serta 1941 menunjukkan masuknya pendatang ke Trowulan untuk mencari pekerjaan baru dengan berkembangnya pabrik gula di Jawa Timur (Gomperts dkk., 2014:74 dalam Kubontubuh, 2021).

Menurut Gomperts, dkk., (2010), paralel dengan sistem tanam paksa, pemerintah kolonial Belanda memulai pembangunan industri untuk menggerakkan ekonomi, salah satunya adalah industri gula di Jawa Timur. Pembangunan pabrik-pabrik gula dilakukan dengan memanfaatkan material yang ada. Salah satu material yang digunakan adalah batu bata dari bekas struktur bangunan tinggalan Majapahit di Trowulan. Penghancuran tinggalan arkeologis di Trowulan dimulai pada masa dimulainya periode Tanam Paksa yang mewajibkan penanaman tanaman komoditas (*cash crop agriculture*). Masyarakat Trowulan, kemudian menemukan bahwa tanah di kawasan tersebut merupakan tanah liat yang baik untuk digunakan sebagai produksi batu bata tradisional (linggan), sehingga pengrajin linggan menjadi profesi baru bagi masyarakat di wilayah tersebut. Produksi batu bata (linggan) mengakibatkan tanah digali sampai kedalaman dua meter dan pembangunan industri gula pasca berakhirnya Perang Jawa (1830) menjadi ancaman bagi tinggalan arkeologis Majapahit di KCBN Trowulan (Kubontubuh, 2021).

Pada tahun 1870 di Hindia Belanda dilaksanakan politik ekonomi liberal yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Agraria 1870 dalam hal sewa dan jual beli tanah membuat para pemilik modal mulai berdatangan ke Hindia Belanda dan menanamkan modalnya untuk membuka perkebunan-perkebunan (Hakim, 2018:7-8). Investasi modal asing mulai bermunculan pada masa ini, yang jauh lebih besar dari modal pribumi yang biasanya hanya dipergunakan untuk perdagangan lokal. Kepemilikan pribumi tidak sebesar kepemilikan swasta. Hal tersebut mengakibatkan perubahan kepemilikan lahan seperti pabrik gula dan perkebunan tanaman pewarna nila (indigo) yang semula didominasi oleh kepemilikan pemerintah menjadi diambil alih kepemilikan swasta.

Kepemilikan tanah Trowulan terbagi-bagi kepada individu-individu pendatang (swasta) yang mulai menetap di Trowulan pada awal masa tanam paksa dan industrialisasi gula. Penelusuran tersebut menunjukkan bahwa kondisi ini mengakibatkan tantangan dalam pembangunan Trowulan di masa ke depan, terutama upaya pelestarian bagi objek Cagar Budaya dalam lahan yang tidak dimiliki oleh pemerintah (Kubontubuh, 2021), selain kerusakan tinggalan arkeologi dengan pemanfaatan linggan sebagai pembuatan batu bata, masyarakat lokal juga turut menggunakan bata merah sebagai bahan baku pembuatan semen merah dengan cara menghancurkan bata dengan diselep lalu diproduksi sebagai semen merah.

Pada tahun 1899 Bupati Mojokerto Ario Kromodjojo Adi Negoro IV menerbitkan *Rapport van den Regent van Modjokerto en Djombang aangaande diens voorlopig Onderzoek van Oudheden in het Gehucht Kedaton (Desa Trawoelan), Residentie Soerabaja* (Laporan Bupati Mojokerto dan Jombang tentang Penelitian Purbakala di Desa Kedaton), kemudian laporan ini ditindaklanjuti dengan penelitian arkeologi profesional dan ekskavasi pada tahun 1913-1942 oleh Dinas Purbakala Pemerintah Kolonial Belanda atau *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië* (OD, post-1949). Pemetaan kepurbakalaan berdasarkan survei arkeologi Kabupaten Mojokerto diawali oleh R.T Kromo Adi Negoro, Bupati Mojokerto yang menjabat tahun 1916-1933 menggantikan ayahnya, Ario Kromodjojo Adi Negoro IV. Survei arkeologi dan penyusunan peta-peta penting tentang Trowulan, yaitu meliputi Peta Kepurbakalaan Modjokerto oleh Kromo Adi Negoro pada tahun 1921, Peta Rekonstruksi Kota Majapahit oleh Ir. Maclaime Pont dan Kromo Adi Negoro pada tahun 1924 dan 1926, Peta Ekskavasi oleh Vistarini pada tahun 1931 (Kubontubuh, 2021).

D. Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, terdapat beberapa regulasi merugikan yang diterapkan oleh pihak penjajah Jepang, dimana regulasi tersebut menimbulkan kerugian yang besar terhadap benda-benda arkeologi yang ada di Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. Banyaknya penawanan terhadap ilmuwan Belanda menyebabkan terbengkalainya proyek arkeologi yang dijalankan pada masa itu, sehingga regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda benar-benar tidak lagi diterapkan menyebabkan terbengkalainya proyek arkeologi yang dijalankan pada masa tersebut. Pada masa kemerdekaan, seluruh aktivitas pelestarian kebudayaan, terutama Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan menjadi sepenuhnya wewenang Pemerintah Indonesia.

E. Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Pada Masa Pasca Kemerdekaan

Kubuntubuh (2021) menjelaskan bahwa, pada tahun 1948 diterbitkan peta Kedaton, serta Pusat Kota Majapahit oleh Stutterheim. Pada awal tahun 1980-an Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengadakan studi kelayakan untuk lokasi pembangunan Museum Trowulan untuk menampung artefak masa klasik, terutama di Trowulan, termasuk temuan arkeologis yang telah dikumpulkan sejak masa kolonial oleh Maclaine Pont dan R.T Kromo Adi Negoro, serta ayahnya, yaitu Ario Kromodjojo Adi Negoro IV. Pembangunan tersebut kemudian dihentikan, oleh karena ditemukan banyaknya temuan arkeologis pada dasar pondasi lokasi bangunan. Pada tahun 1983, dilakukan upaya pengamatan Trowulan melalui penginderaan jauh berupa foto udara oleh Bakosurnatal yang diterbitkan dalam bentuk peta. Pada tahun 1983-1985 diselenggarakan penelitian tentang Trowulan untuk menyusun Rencana Induk Arkeologi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1986, penelitian tersebut menghasilkan Rencana Induk Pemugaran Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit yang diterbitkan dengan judul “Bukti-Bukti Kejayaan Majapahit Muncul Kembali”.

Keseriusan pemerintah ditunjukkan dalam implementasi program pemugaran yang masuk dalam buku Program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) IV tahun 1985-1990. Tercatat beberapa bangunan di Trowulan yang telah dipugar, antara lain Candi Tikus (dipugar tahun 1985 dan selesai tahun 1989), Gapura Bajang Ratu (1989- 1992), Gapura Wringin Lawang (1991-1994), dan Candi Brahu (1990-1995), namun kegiatan pemugaran tersebut masih sangat terbatas pada lingkup arkeologi, selain itu, terdapat tantangan yang

besar berupa perusakan situs dan bangunan tinggalan Majapahit oleh sebagian penduduk Trowulan yang sedang bergelut memenuhi kebutuhan hidupnya (Mundardjito, 1986 dalam Kubontubuh, 2014).

F. Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Pada Masa Pasca Reformasi

Pada tahun 2012 perencanaan tata ruang Kawasan Trowulan dicantumkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011–2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032. Perencanaan tata ruang Kawasan Trowulan di dalam RTRW Provinsi Jawa Timur (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012) dimasukkan ke dalam Rencana Kawasan Lindung Provinsi sebagai Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya dan Kawasan Lindung Geologi. Kawasan Trowulan sebagai Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya secara lebih spesifik dikategorikan sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Berupa Lingkungan Bangunan Non-Gedung (Pasal 60 Ayat 1 Butir g), sementara Kawasan Trowulan sebagai Kawasan Lindung Geologi, secara lebih spesifik dikategorikan sebagai Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil (Situs Geoarkeologi) (Pasal 68 Ayat 4 Butir a).

Perencanaan tata ruang Kawasan Trowulan di tingkat kabupaten (Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012) menetapkan fungsi Kecamatan Trowulan sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Peruntukan Budidaya, dan Kawasan Strategis Kabupaten. Fungsi Kecamatan Trowulan sebagai Kawasan Lindung dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan (Pasal 34-35). Sebagai Kawasan Peruntukan Budidaya, Kecamatan Trowulan ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang ada (Pasal 41-48), sementara, penetapan Kecamatan Trowulan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) maksudnya adalah wilayah ini penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan (Pasal 50-52).

Pada tahun 2013, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar

Budaya Peringkat Nasional. Batas delineasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan (KCBN Trowulan) ini berdasarkan batas-batas alam berupa aliran Sungai Gunting di sebelah barat, Sungai Ngonto di utara, Sungai Brangkal di timur, dan hutan KPH Kabupaten Jombang di sebelah selatan. Secara keseluruhan kawasan ini meliputi Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Sooko di Kabupaten Mojokerto, serta Kecamatan Mojoagung di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, sehingga Kawasan Trowulan harus dilestarikan berdasar amanat Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan yang dilaksanakan oleh tim gabungan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang meliputi warisan budaya berupa situs, struktur, bangunan, dan benda baik yang memenuhi kriteria Cagar Budaya maupun yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Luas area survei kurang lebih 11 km² dengan data awal berjumlah 41 titik objek (BPCB Jawa Timur, 2017). Pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Tahap II yang dilaksanakan oleh oleh tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang meliputi warisan budaya berupa situs, struktur, bangunan, dan benda baik yang memenuhi kriteria cagar budaya maupun yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Luas area survei yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut kurang lebih 4 km² dengan data awal berjumlah 3 titik objek (BPCB Jawa Timur, 2017).

Pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan yang dilaksanakan oleh tim gabungan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang meliputi warisan budaya berupa situs, struktur, bangunan, dan benda baik yang memenuhi kriteria cagar budaya maupun yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Luas area survei kurang lebih 16 km² dengan data awal berjumlah 19 titik objek yang terdapat di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Lokasi kajian di Kabupaten Mojokerto meliputi Kecamatan Jatirejo: Desa Kunitir, Desa Sumengko, Desa Dukuh Ngarjo; dan Kecamatan Trowulan: Desa Sentonorejo, Desa Temon, Desa Pakis, Desa Trowulan, Desa Beloh, Desa Domas, Desa Jatipasar, Desa Wonorejo, Desa Kejagan, Desa Watesumpak, Desa Bejjong, Desa Bicak, dan Desa Panggih. Sementara kajian di Kabupaten Jombang meliputi Kecamatan Mojoagung: Desa Tanggalrejo; dan Kecamatan Mojowarno: Desa Japanan, dan Desa Grobogan (BPCB Jawa Timur, 2018).

Pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Tahap IV yang dilaksanakan oleh tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang meliputi warisan budaya berupa situs, struktur, bangunan, dan benda, baik yang memenuhi kriteria cagar budaya maupun yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Luas area survei kurang lebih 16 km² dengan data (kekurangan data yang belum dilengkapi dari tahap sebelumnya) berjumlah 42 titik objek yang terdapat di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang (BPCB Jawa Timur, 2018). Pada tahun 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 140/M/2023 tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Trowulan menetapkan Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Trowulan terdiri atas, zona inti, zona penyangga, zona pengembangan (pelindungan lanskap budaya), dan zona penunjang (pengembangan pembangunan terbatas) yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian.

Saat ini Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan telah menjadi kawasan konservasi yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia yang berkolaborasi dengan masyarakat luas untuk melestarikan warisan budaya, terutama warisan Cagar Budaya di kawasan tersebut. Implementasi regulasi dan peningkatan kesadaran pada masyarakat luas tentang pentingnya memastikan kelestarian budaya Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan akan menjadi tolak ukur eksistensi daripada Cagar Budaya yang ada di kawasan tersebut dan manfaatnya bagi masyarakat luas, sehingga masih diperlukan langkah lanjutan untuk benar-benar memastikan kelestarian yang keberlanjutan di Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan agar dapat meningkatkan nilai dan status hukum di mata internasional bahwa Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan turut memiliki andil besar sebagai salah satu warisan budaya dunia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan merupakan kawasan yang telah ada sejak abad 10 Masehi sebagai tanah sima atau tanah yang memiliki hak istimewa, meskipun berganti pemerintahan raja siapapun yang berkuasa. Pada masa klasik kawasan tersebut dimanfaatkan oleh manusia sebagai lahan pemukiman bangsawan sampai pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa Islam Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan mulai perlahan ditinggalkan dan berubah menjadi kota mati, selanjutnya pada masa kolonial kawasab tersebut mulai dihuni oleh manusia sampai

sekarang. Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan yang memiliki tingkat konsentrasi peninggalan Cagar Budaya dari berbagai kerajaan pada masa klasik, kemudian menjadikan kawasan tersebut memiliki hak istimewa untuk dilindungi karena memiliki nilai penting dari sisi historis dan arkeologis. Saat ini Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan menjadi kawasan yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan memperkuat identitas bangsa, melestarikan Cagar Budaya, dan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang agar tidak lupa akan akar sejarahnya sebagai bangsa besar.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen, Arsip, atau Undang-Undang

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 140/M/2023 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Buku, Tesis, & Laporan Kegiatan

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. (2017). *Laporan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional trowulan – Tahap I*. Mojokerto : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. (2017). *Laporan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional trowulan – Tahap II*. Mojokerto : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. (2018). *Laporan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional trowulan – Tahap III*. Mojokerto : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. (2018). *Laporan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional trowulan – Tahap IV*. Mojokerto : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.

Damanik, Sarintan E. (2020). *Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia.

Hakim, Cecep Lukmanul. (2018). *Politik Pintu Terbuka : Undang-Undang Agraria dan Perkebunan Teh di Daerah Bandung Selatan 1870-1929*. Ciamis : Vidya Mandiri.

- Kartodirjo, Sartono., dkk. (1993). *700 Tahun Majapahit (1293-1993) : sebuah Bunga Rampai*. Surabaya : Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Kubontubuh, Catrini Pratihari. (2021). *Model Konseptual Pelestarian Berbasis Kawasan Bagi Cagar Budaya Tak Uneh Studi Kasus Kawasan Ibu Kota Majapahit di Trowulan Jawa Timur*. Bandung : Institut Teknologi Bandung.
- Muljana, Slamet. (2005). *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Bantul : LKiS Yogyakarta.
- Mulyana, Slamet. (1979). *Negarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta : Bhrotara Karya Aksara.
- Munandar, Agus Aris. (2024). *Majapahit : Narasi yang Tiada Pernah Usai*. Indramayu : Rumah Pustaka.
- Perkasa, Adrian. (2015). *Dalam Bayangan Kebesaran Masa Lalu : Transformasi Pemaknaan dan Pemanfaatan Warisan Majapahit dari Pra-Kolonial Hingga Pascakolonial di Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. (1988). *Trowulan Dalam lintasan Sejarah*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. Notosusanto, Nugroho. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta : PN. Balai Pustaka.
- Sampurno dan Bandonu, (1980). *Peranan Geologi Dalam Pertumbuhan dan Kehancuran Kerajaan-Kerajaan Lama di Jawa dengan Contoh Kerajaan Majapahit PIT-IX- IAGI*. Yogyakarta.
- Sukatno, Otto. Mulyono, Untung. (2018). *Pararton : Kitab Para Raja : Menguak Jejak Genealogi Sejarah Wangsa Jawa dari Tarumanegara Hingga Majapahit*. Bandung : Nusa Media.
- Taki, Herika Muhamad. Wartaman, Anita Sitawati. (2023). *Perpetaan Untuk Perencanaan Wilayah dan Kota*. Makassar : PT. Nas Media Indonesia.
- Wibowo, A.A. (1982). *Negarakretagama dan Trowulan*. Berkala Arkeologi III (1).